

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- Hadjon, Philipus M. Penataan Hukum Administrasi. (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998).
- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Cetakan ke-15. (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).
- Laoly, Yasonna H. Birokrasi Digital. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019).
- Manan, Bagir. Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian. (Bandar Lampung: FH Unila, 1996).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Pertama. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Soemitro, Ronny Haniatjo. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Spelt, N.M. dan J.B.J.M. ten Berge. Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon. (Surabaya: Yuridika, 1993).

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-19. (Bandung: Alfabeta, 2013).

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). (Depok: Rajawali Pers, 2020).

B. Jurnal

Darmayanti, Putu Novita dan I Made Dedy Priyanto. “Hak Anak Angkat terhadap Pembagian Warisan”. (Jurnal Kertha Semaya: Volume 04, Nomor 02, September 2015).

Elviandri, Khuzdaifah Dimyati dan Absori. “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”. (Jurnal Mimbar Hukum: Volume 31, Nomor 02, Juni 2019).

Hadi, Syofyan dan Tomy Michael. “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration”. (Jurnal Cita Hukum: Volume 05, Nomor 02, Desember 2017).

Heriawan, Muhammad. “Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak”. (e-Jurnal Katalogis: Volume 05, Nomor 05, Mei 2017).

Nasution, Hotnidah. “Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat dan Implikasinya terhadap Masalah Waris”. (Jurnal Ahkam: Volume 14, Nomor 01, Januari 2014).

Juliani, Henny. “Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik”. (Administrative Law & Governance Journal: Volume 1, Edisi Khusus 1, Agustus 2018).

Pratiwi, Ika Putri Pratiwi. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”. (Jurnal Hukum Universitas Brawijaya: Edisi Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2016).

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”. (Jurnal Legislasi Indonesia: Volume 13, Nomor 02, Juni 2016).

Rokhim, Abdul. “Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”. (Jurnal Ilmiah “Dinamika Hukum”: Volume 19, Nomor 36, Februari-Mei 2013).

Tambunan, Fransiska Hildawati. “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*)”. (UNNES Law Journal: Volume 02, Nomor 02, Oktober 2013).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 460/19 Tahun 2017 tentang
Pembentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak
Provinsi Jawa Tengah.

Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”. (Administrative Law & Governance Journal: Volume 02, Nomor 01, Juni 2019).

D. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 131/Pdt.P/2017/PN.Mkd.

Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 146/Pdt.P/2017/PN.Mkd.

Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 146/Pdt.P/2017/PN.Byl.

Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 245/Pdt.P/2018/PA.Smg.

Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor 353/Pdt.P/2019/PA.Pt.

E. Bahan Pustaka Tanpa Penulis

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Prosedur Pengangkatan Anak. (Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019).

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2020).

F. Berita

BNews. “Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Buka Sosialisasi Persyaratan Pengangkatan Anak di Semarang”. (WartaBengawan.com, 22 Juli 2019), diakses pada 26 November 2020.

De Suriyani, Luh. “Perjalanan Kasus Pembunuhan Engeline”. (Lokadata, 8 Februari 2016), diakses pada 8 Januari 2020.

G. Laporan

Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Jateng. Jumlah Permohonan Izin Pengangkatan Anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019. (Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019), diperoleh dari Laporan Kerja Praktek oleh Clareta Adikris Savitri.

Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Jateng. Rekomendasi yang Telah Dihasilkan Tim PIPA Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019. (Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019), diperoleh dari Laporan Kerja Praktek oleh Clareta Adikris Savitri.

H. Orasi Ilmiah

Hadjon, Philipus M. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum: “Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih”. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. (Surabaya, 10 Oktober 1994).

I. Wawancara

Anonim COTA melalui Munfit Kamal Ahmad. Wawancara. Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (Semarang: 23 November 2020).

Budi Darmawan. Wawancara. Kepala Sub Bagian Program di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (Semarang: 17 Januari 2020).

Munfit Kamal Ahmad. Wawancara. Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (Semarang: 23 November 2020).